

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

JUMAT
26 September 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

APBD Perubahan Pemkot Baubau TA 2025 Ditetapkan Jadi Perda



Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Setelah melewati proses pembahasan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran (TA) 2025 dapat ditetapkan

Lanjutkan ke Hal: 7

Otoritas Pelabuhan dan Pemkot Baubau Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi



Laporan: Amran

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau memiliki slogan

kerja bersama dalam mewujudkan visi kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan

bermartabat. Visi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya ma-

Lanjutkan ke Hal: 7

Pelantikan Pengurus HMI-Kohati Baubau, Yusran Fahim Tekankan Peran Mahasiswa Berpikir Kritis



Pewartu: Amat Jr

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE menekankan pentingnya keberadaan organisasi mahasiswa

dalam memberikan kontribusi nyata melalui pemikiran kritis, serta solusi bagi tantangan yang dihadapi bangsa dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan

kannya saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korp HMI-Wati (Kohati)

Lanjutkan ke Hal: 7

Antisipasi Bencana, BPBD dan Kapolsek Tinjau Jembatan Bypass Waruruma Yang Keropos dan Rawan Roboh

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait jembatan yang sudah keropos dan hampir roboh di bypass Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna,



Lanjutkan ke Hal: 7

"Mas Wapres" Kucurkan Bantuan Rp 100 Juta Untuk Kelompok Pengrajin Tenun Sulaa



Laporan: Rahim

BAUBAU, BP-Wakil Presiden RI Gibran Raka Bumiringraka yang akrab

dipanggil juga mas Wapres mengucurkan bantuan sebesar Rp 100 Juta kepada kelompok pengrajin tenun yang ada di

Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



APBD Perubahan Pemkot Baubau TA 2025 Ditetapkan Jadi Perda

kan menjadi Peraturan Daerah pada sidang paripurna DPRD Kota Baubau Rabu (24/09/2025).

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD T.A 2025 mengatakan, Perubahan pendapatan dalam APBD Kota Baubau TA 2025 direncanakan sebesar Rp.898,51 M p terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.142 M, Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp.741,98 M dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 14,53 M.

Proporsi terbesar dari Pendapatan Daerah, masih berasal dari Dana Transfer. Pada Rancangan APBD ini proporsi Dana Trans-

fer sebesar 82,58% dari total pendapatan Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah baru memberikan kontribusi sekitar 15,80% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,62%.

“Kita sadar bahwa, pembahasan Raperda ini sangat menyita waktu dan pikiran, namun semua itu dilakukan dengan ikhlas karena semata-mata sikap kepedulian, perhatian dan tanggung jawab kita yang telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pembahasan Raperda Sebelumnya, itu semua dilakukan dalam rangka menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta kesinambungan proses

pembangunan di Kota Baubau yang sama kita cintai,”ungkap Yusran Fahim.

D i t a m b a h k a n , APBD merupakan jembatan dalam rangka upaya Pemkot Baubau mewujudkan visi Pemerintahan Daerah dan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah tersebut, Pemkot Baubau melalui Visi RPJMD tahun 2025-2029 yaitu “Baubau kota budaya yang ramah, cerdas sejahtera dan bermartabat”.

Untuk mencapai visi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode masa bakti Kepala Daerah, pelaksanaannya dimulai dari tahun 2026 sebagai tahap pertama dari lima tahap RPJMD Kota Baubau periode 2025-2029,

yang menginginkan Kota Baubau maju dalam berbagai dimensi pembangunan sehingga berdampak kesejahteraan masyarakat.

Pada peningkatan Perubahan Anggaran Dalam RAPBD Kota Baubau TA 2025, Pemkot Baubau bertekad untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih sehat, efektif dan berkelanjutan sehingga menjadi dasar kestabilan ekonomi dan mengoptimalkan alokasi anggaran pada semua sektor pembangunan agar benar-benar efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau. (*)

Otoritas Pelabuhan dan Pemkot Baubau Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi

nusia, pertumbuhan ekonomi kota yang inovatif, dan pengembangan kawasan-kawasan potensial secara merata dan berkualitas. Namun demikian, harus didukung oleh berbagai sektor, di antaranya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari melalui penguatan ketahanan kesehatan di pintu masuk pelabuhan dan wilayah Kota Baubau. Itu sangat diperlukan latihan simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kota Baubau.

Kegiatan simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat bertujuan memperkuat sinergitas dan kolaborasi para otoritas pelabuhan dan Pemkot Baubau dalam menangani kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat secara efektif, efisien, dan profes-

sional. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat membuka kegiatan Simulasi penanggulangan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat akibat patogen respiratorik di pintu masuk Pelabuhan Murhum Baubau Selasa (23/09/2025).

Menurut Wa Ode Hamsinah Bolu, berdasarkan PP nomor 28 tahun 2024, penanganan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara dan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan sehingga melibatkan peran dari semua unsur terkait dengan mengedepankan sinergitas dan kolaboratif.

Diungkapkan, ke-

jadian kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bencana non alam akibat terjadinya suatu wabah penyakit di suatu daerah. Dampak kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat terlihat pada saat pandemi covid 19 yang menurunkan sistem perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya Kota Baubau. Olehnya itu, dibutuhkan ketahanan kesehatan melalui kegiatan latihan simulasi sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan peran dari berbagai unsur pemerintahan, di antaranya balai kekarantinaan kesehatan kelas I Kendari dengan tugas pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Tentunya, dalam melaksanakan tugasnya diharapkan balai kekarantinaan kesehatan kelas I Kendari memperkuat koordinasi dan siner-

gitas dengan Pemerintah Kota Baubau dan lintas sektor terkait.

“Atas nama Pemkot Baubau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Karantina Kesehatan Kelas I Kendari serta kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan ikut mendukung kegiatan simulasi penanggulangan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat akibat patogen respiratorik di pintu masuk pelabuhan murhum Kota Baubau tahun 2025. Untuk itu, dengan terlaksananya latihan simulasi kiranya dapat menjadi standar bagi pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk pelabuhan dan wilayah Kota Baubau,” ungkapnya. (*)

“Mas Wapres” Kucurkan Bantuan Rp 100 Juta Untuk Kelompok Pengrajin Tenun Sulaa

Bantuan tersebut diserahkan langsung melalui stafsus Mas Wapres RI, Suwardi dan diterima oleh perwakilan pengrajin, Musida Rabu (24/09/2025). Menurut Suwardi, bantuan Mas Wapres ini adalah bantuan masyarakat, yang diberikan secara pribadi dari Mas Wapres, untuk pengembangan budaya, kearifan lokal, termasuk bagi para pengrajin tenun tradisional.

Wali Kota Baubau Yusran Fahim dalam keterangan persnya usai bertemu stafsus Wapres RI berharap bantuan tersebut digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha pengrajin di Sulaa, sehingga dapat terus berkelanjutan. Bantuan uang dari

mas wapres akan dipergunakan para pengrajin untuk memperbaiki peralatan yang sempat dihantam ombak, juga belanja bahan seperti benang alam, benang extra, sisir, dan kebutuhan produksi lainnya. Bantuan mas wapres ini Bak Gayung bersambut atas koordinasi pemkot dengan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Pengrajin tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa, Musida, mengucapkan terima kasih kepada Mas Wapres, yang meskipun tidak hadir langsung ke Baubau, namun sudah berempati untuk membantu pengembangan kerajinan tenun khas Buton. (*)

Antisipasi Bencana, BPBD dan Kapolsek Tinjau Jembatan Bypass Waruruma Yang Keropos dan Rawan Roboh

BPBD Kota Baubau bersama Polsek Kalkukuna melakukan peninjauan terhadap jembatan yang selama ini digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar pada Rabu (17/09/2025).

Kepala BPBD Kota Baubau La Ode Muslimin Hibali, SE, M.Si dalam keterangan persnya Kamis (18/09/2025) mengungkapkan, jembatan yang telah ditinjau tersebut sebenarnya untuk ujung jembatannya itu sudah longsor dibawahnya, meskipun diakui tanah di atasnya masih bagus kelihatan. Hal itu diakibatkan abrasi laut dari ujung jembatan, itu kurang lebih 20 meter larinya dan sudah retak. Namun demikian, kalau tidak cepat ditangani, maka bisa membahayakan pengguna jalan dan nelayan yang melewati di bawah jembatan dan bisa longsor

dan roboh. Sehingga memang itu harus secepatnya ditangani pihak dari yang melaksanakan pembangunan yakni Pemprov Sultra.

Muslimin Hibali mengakui, jembatan bypass yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sultra belum diserahkan. Meski demikian, pihaknya juga sudah menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Sultra untuk secepatnya dilihat dan dilakukan penanganan. “Kenapa kami ke sana? Ternyata sudah ada kekhawatiran dari pihak kepolisian ini membahayakan. Sehingga kepolisian mengambil inisiatif memanggil kami di lapangan camat, lurah untuk meninjau lokasi tersebut. Dan itu sudah dipasangkan garis polisi karena rawan. Mudah-mudahan dari pihak provinsi sebagai pemilik aset segera cepat menangani itu karena jalan itu dipak-

ai terus. Mobil-mobil kendaraan berat lewat situ kadang-kadang,â€ ungunya.

Ditambahkan, sebenarnya tidak ada larangan bahwa itu tidak boleh lewat sebab dilokasi tersebut saat ini sudah diberikan tanda-tanda bahwa itu rawan bencana. Termaksud ada baliho peringatan yang dicetak oleh Kapolres Baubau bahwa itu rawan bencana.

Kalaks BPBD Kota Baubau La Ode Muslimin Hibali menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan lokasi yang sudah rawan longsor tersebut dan selalu hati-hati kalau melewatinya. Demikian pula dengan kendaraan berat seperti truk, bus yang berat-berat disarankan sebaiknya jangan melewati area rawan longsor tersebut. (*)

Pelantikan Pengurus HMI-Kohati Baubau, Yusran Fahim Tekankan Peran Mahasiswa Berpikir Kritis

Cabang Kota Baubau Periode 2025-2026 yang berlangsung di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (22/09/2025). Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi HMI dan Kohati dalam melanjutkan peran organisasi mahasiswa Islam yang

telah lama menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, sekaligus wadah kaderisasi pemimpin muda bangsa.

Wali kota Baubau H Yusran Rahim, SE dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada ketua beserta jajaran pengurus HMI dan

Kohati Cabang Kota Baubau periode 2025-2026 yang baru saja dilantik dan diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, serta mampu menjaga serta merawat organisasi ini, agar semakin besar, solid serta berintegritas. Sehingga kedepannya dapat menjadikan HMI se-

bagai lembaga yang selalu berkontribusi secara nyata dalam membangun umat, bangsa, negara dan daerah. Dan yang tak kalah pentingnya, kepada ketua dan segenap pengurus HMI Cabang Baubau untuk selalu mendukung visi, misi, program, kebijakan serta kegiatan pemerintah daerah, melalui ide,

gagasan serta pemikirannya, untuk bersama-sama mewujudkan Kota Baubau, maju dan sejahtera.

Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, HMI sebagai salah satu elemen pembangunan di daerah yang keberadaannya, memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah, tidak hanya di tunt untuk melaksanakan rencana programnya, akan tetapi juga diharapkan turut serta dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan negeri dan ummat di daerah ini.

Oleh sebab itu, sebagai organisasi tempat berhimpunnya para mahasiswa islam di Kota Baubau, HMI

hendaknya ikut serta dan menjadi garda terdepan dalam menjongsong pembangunan Kota Baubau yang berrmarwah, maju dan sejahtera. Pasalnya, HMI secara organisatoris, senantiasa dapat mengembangkan diri melalui pemikiran dan konsepsi strategisnya melalui semangat intelektual, akademis dan aktivitasnya yang berbasis agama progresivitas dalam satu bingkai intelektual mahasiswa islam. Maka dari itu, HMI harus cepat beribaur dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta tanggap terhadap perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat agar dapat berjalan di Kota Baubau, HMI

juan. “Namun sebelumnya kembali kami ingatkan, rawatlah amanah itu dengan sebaik mungkin. HMI harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerjasama, membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang akan menghantam. Mahasiswa islam ke depan, akan banyak dinamika, tantangan, dan liku-liku perjuangan dalam menjalankan organisasi. Semoga hmi dapat melahirkan insan ulul albab sebagaimana tujuan HMI. Dan HMI akan selalu berjuang untuk mewujudkan islam yang rahmatan lil ‘alamiin,â€ ungunya. (*)

Pj Sekda Baubau Keluhkan ASN Yang Mengikuti Apel Pagi Berkurang



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pj Sekda Kota Baubau Drs Meizat Amril Tamim, M.Si saat memberikan arahan pada apel pagi gabungan OPD di halaman kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (22/09/2025) mengeluarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Baubau yang mengikuti apel pagi tidak seperti biasanya atau berkurang, di mana pada biasanya halaman apel begitu padat. Pihaknya tidak mengetahui kenapa bisa seperti itu, apakah waktu apel ini waktunya sudah berubah

atau bagaimana. “Dan saya kira waktunya ini 07.30 Wita apel sudah dilaksanakan dan apel sudah berlangsung tetapi masih ada yang datang dan kita berikan apresiasi buat mereka yang mau hadir pada apel pagi hari ini. Dan tentunya kepada yang tidak datang di mohon kepada kepala OPD ini menjadi perhatian, karena apel ini hanya seminggu sekali, bagaimana kalau di lakukan sebulan sekali. Pasalnya, seminggu sekali saja apel pagi sudah tidak mau hadir, apakah disebabkan semangat kita yang sudah mulai berkurang atau bagaimana,”

ujarnya.

Disamping itu, tambahnya, juga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat terlihat sudah mulai kendur dan hal ini tidak boleh terjadi karena ini merupakan kewajiban ASN yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi, diketahui bersama bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan Pemkot Baubau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di OPD. Dan Wali Kota Baubau sudah membagi habis kewenangan kepada semua di OPD. Oleh

sebab itu, di harapkan kepada para asisten yang mengampuh OPD nya agar selalu di perhatikan dan di evaluasi.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Pj Sekda Kota Baubau Meizat Amril Tamim juga menyinggung pertumbuhan ekonomi di Kota Baubau yang diharapkan agar terus mengalami peningkatan. Karena itu, dari tim percepatan pertumbuhan ekonomi, TPID, Tim Kota Sehat agar bisa saling kolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Baubau menjadi lebih baik lagi ke depannya. (*)

DPRD Buton Tengah Gelar Paripurna Penyampaian RAPBD Perubahan 2025



Laporan: Rahim

BUTENG, BP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato penjelasan umum Bupati Buton Tengah atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/9/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Buton Tengah, Sa'at Muzrimin Haadi.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Basan, S.Sos, secara resmi menyerahkan materi Rancangan APBD Perubahan beserta nota keuangan T.A 2025 kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada lima fraksi di DPRD Buton Tengah.

Dalam sambutan-

nya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan RAPBD Perubahan 2025 merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab, dengan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa rancangan tersebut disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menggarisbawahi pentingnya berpedoman pada kerangka makro ekonomi, pokok-pokok kebijakan fiskal, serta rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan RAPBD Perubahan 2025 juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD, dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan ekonomi terkini baik regional, nasion-

al, maupun global, jelasnya.

Lebih lanjut, Adam Basan menegaskan perlunya langkah kebijakan pengelolaan keuangan yang inovatif dan kreatif, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah, guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan makro tahun 2025.

Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD agar dalam mengelola APBD Perubahan T.A 2025 nantinya lebih cermat, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi awal dari rangkaian pembahasan RAPBD Perubahan 2025 antara pemerintah daerah bersama DPRD Buton Tengah. Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota dewan atas terselenggaranya agenda penyampaian pengantar nota keuangan tersebut. (*)

Titiek Soeharto Speechless Nonton Pidato Membara Prabowo di PBB

JAKARTA- Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau biasa dikenal Titiek Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) malam WIB.

Titiek mengaku sempat nonton bareng atau nobar untuk menyaksikan secara langsung pidato tersebut di sela-sela kunjungan kerja di Maluku Utara.

Titiek nyaris tak bisa berkata-kata saat menyaksikan pidato Prabowo yang menggebu-gebu itu.

“Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan kerja ke Maluku Utara, jadi nobar bareng bareng sampai jam 12

[malam] nungguin. Dan yaudah apa ya, speechless,” kata putri Presiden Soeharto itu di kompleks parlemen, Rabu (24/9).

Titiek menyebut pidato mantan suaminya itu telah menunjukkan sikap tegas Indonesia terhadap masalah Palestina. Menurut dia, sejak dulu Indonesia mendukung kemerdekaan negeri lahirnya tiga agama samawi itu.

“Ya itu sikap Indonesia. Sejak dulu kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Prabowo dalam pidatonya menyampaikan sejumlah hal, antara lain solusi dua negara atau two state solution atas penjajahan di Palestina oleh Israel, krisis iklim,

hingga peran PBB.

Khusus Palestina, dia menekankan Indonesia siap mengakui Israel jika Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara.

Solusi dua negara adalah kerangka internasional yang disepakati untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara saling berdampingan, saling menghormati, dan saling mengakui kedaulatan masing-masing.

“Saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel,” kata Prabowo. (r)

PDIP Usul Pileg Proporsional Tertutup Lewat Revisi UU Pemilu

Laporan: Hadi

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengusulkan perubahan pada sistem pemilu legislatif (pileg) menjadi proporsional tertutup lewat revisi UU Pemilu.

Revisi UU Pemilu telah ditetapkan masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan usulan sistem tersebut telah menjadi sikap partainya dalam Kongres awal Agustus lalu. Dia menilai usulan itu penting agar institusionalisasi partai bisa berjalan.

“Memang partai dalam proses melakukan institusionalisasi agar fungsi-fungsi partai bisa berjalan, sikap PDI Perjuangan di dalam Kongres memang mengedepankan proporsional tertutup,” ujar Hasto di sekolah partai, Rabu (24/9).

Hasto menilai de-



mokrasi elektoral yang hanya berbasis populisme hanya akan melahirkan politik yang bersifat industrial dan terlalu kapitalistik. Imbasnya, politik membutuhkan investasi yang besar.

Namun, menurutnya, sistem proporsional tertutup tetap harus dibarengi dengan demokratisasi di internal partai, dan perbaikan sistem kaderisasi. Sehingga, para calon anggota legislatif yang dicalonkan adalah mereka yang memahami dan memiliki kualifikasi.

“Sehingga yang

dicalonkan adalah mereka-mereka yang sangat memahami dan memiliki kualifikasi tertinggi di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan bagi desain untuk kejayaan Indonesia ke depan,” katanya.

Hasto mengatakan bahwa usulan itu masih dalam tahap komunikasi. Dia tak menampik ada pula usulan untuk mencampur sistem proporsional terbuka dan tertutup seperti yang berlaku di Jerman.

“Ya ini kan masih dalam suatu proses se-

hingga dialog-dialog itu juga akan dilakukan tentu juga bersama dengan pemerintah,” katanya.

Meski begitu, menurut dia, usulan sistem proporsional tertutup hanya untuk pileg. Sementara, pilpres dan pemilihan kepala daerah tetap menggunakan sistem pemilu terbuka dan langsung.

“Kalau proporsional tertutup adalah untuk pemilu legislatif. Untuk pemilu presiden, wakil presiden, kepala daerah wakil kepala daerah, itu adalah dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya. (*)

Hugua Buka Rapat Sinergitas Pencegahan PMI Non-Prosedural dan TPPO



Pewartanya: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Rapat Sinergitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berlangsung di Claro Hotel Kendari, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur penting, antara lain Dirjen Pelindungan KP2MI yang diwakili Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, Advokasi Pekerja Migran Indonesia KP-2MI, Kapolda Sultra atau mewakili, Kabinda Sultra, Kepala Disnakertrans Sultra, Kepala Kanwil Imigrasi Sultra, para Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Sultra, para Kepala BKPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Kanit Imigrasi, Kepala BP-3MI Sultra beserta jajaran; serta mitra kerja terkait.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sultra, La Ode Askar, dalam laporannya menyampaikan bahwa PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Namun, di balik kontribusinya, banyak persoalan yang muncul di lapangan, termasuk risiko eksploitasi dan penempatan ilegal.

"Banyak hal yang perlu kita sinergikan di Sultra agar PMI tidak ter eksploitasi ketika bekerja di luar negeri. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden kepa-

da Kementerian Pelindungan Pekerja Migran untuk memastikan warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan penuh. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pemerintah pusat atau daerah, tetapi kolaborasi semua pihak," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tujuan rapat ini antara lain menyusun langkah strategis bersama dalam pencegahan PMI non-prosedural, meningkatkan sinergi lintas instansi, menyampaikan data terkini terkait kasus penempatan ilegal dan TPPO, serta memperjelas peran masing-masing lembaga dalam melindungi PMI.

Lebih lanjut, La Ode Askar berharap rapat ini menghasilkan pembentukan gugus tugas pencegahan PMI non-prosedural yang akan di-SK-kan Gubernur Sultra dengan anggota lintas stakeholder. Selain itu, perlu dilakukan diseminasi informasi hingga ke desa-desa, membangun kesadaran kolektif masyarakat, dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

"Kami juga mengundang BPMD karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 42, pemerintah desa memiliki empat tanggung jawab terhadap pekerja migran. Namun, di lapangan banyak kepala desa yang belum memahami hal ini. Karena itu perlu ada sinergi antara BPMD dan stakeholder lain untuk melakukan sosialisasi," tambahnya.

Agenda rapat juga dirangkakan dengan penyerahan cenderamata dari Kementerian/BP2MI kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Kepolisian Daerah Sultra, serta Kanwil Imigrasi Sultra. Selain itu,

diberikan pula piagam penghargaan kepada Pemprov Sultra yang diterima oleh Wakil Gubernur, Kepolisian Daerah Sultra, Kanwil Imigrasi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal Sultra.

"Pekerja Migran Indonesia adalah kekuatan penting bangsa. Mereka tidak hanya bekerja demi keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui remitansi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Mereka adalah pahlawan devisa," ujar Hugua.

Namun demikian, ia menegaskan masih banyak tantangan serius yang harus dihadapi, terutama penempatan PMI secara non-prosedural yang membuka peluang terjadinya eksploitasi, pelanggaran hak-hak pekerja, hingga tindak pidana perdagangan orang.

"Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang mencederai martabat bangsa. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat," tegasnya.

Hugua menekankan beberapa langkah strategis yang harus diwujudkan bersama, yakni:

1. Menyamakan persepsi dan komitmen bahwa pencegahan PMI non-prosedural

merupakan bagian penting dari perlindungan warga negara.

2. Memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dinas tenaga kerja, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat sipil.

3. Pendekatan preventif melalui edukasi kepada calon PMI dan keluarganya terkait hak, prosedur resmi, dan risiko berangkat secara ilegal.

4. Penindakan tegas dan konsisten terhadap pelaku TPPO maupun pihak yang terlibat dalam penempatan non-prosedural tanpa pandang bulu.

5. Peningkatan peran pemerintah daerah dan stakeholder dalam memberdayakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan pelatihan di dalam negeri.

"Upaya kita hari ini bukan sekadar agenda rutin atau seremonial, tetapi panggilan moral, kemanusiaan, sekaligus amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, baik di dalam maupun luar negeri," katanya menegaskan.

Hugua juga berharap rapat ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait. Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi setiap rekomendasi agar benar-benar terimplementasi dalam aksi nyata.

"Semoga sinergi kita hari ini menjadi tonggak penting dalam mencegah penempatan non-prosedural dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di daerah kita," tutupnya. (*)

Mendagri Tito Soroti Inflasi Tinggi di Beberapa Provinsi Termasuk Sultra



Pewartanya: Lisna

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (23/9/2025) tersebut, diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Arief Prasetyo Adi.

Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra oleh Sekda Sultra, Plt. Inspektur Sultra, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, BPS Sultra, serta OPD teknis terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa angka inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (year-on-year/yoy) dan -0,08 persen (month-to-month/mtm). Menurutnya, capaian ini tergolong ideal dan sejalan dengan target pemerintah menjaga inflasi dalam kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Rentang angka 2,5 persen plus minus 1 persen adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Ini menjaga keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan

konsumen," jelas Tito. Lebih lanjut, Tito menegaskan inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik karena dapat merugikan produsen, seperti petani, nelayan, dan pelaku industri, yang kesulitan menutup biaya produksi. Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan memberatkan konsumen karena harga kebutuhan melonjak tinggi.

"Di angka 2,31 persen ini adalah capaian yang sangat bagus sekali," tambahnya.

Meskipun secara nasional inflasi terkendali, Mendagri mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen. Daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.

Untuk itu, Tito meminta agar pemerintah daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BPS, Bulog, Bank Indonesia, serta asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo, guna mencari penyebab tingginya inflasi.

"Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, Bank Indonesia, bila perlu asosiasi pengusaha, untuk memetakan penyebabnya apa," pesan Tito.

Menurutnya, inflasi tinggi di suatu daerah bisa disebabkan oleh keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti tarif air minum, hambatan distribusi akibat cuaca maupun logistik, hingga adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.

Ia menyampaikan harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang semula mengalami kenaikan harga pada minggu ketiga Agustus

2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025. Sebaliknya, sebanyak 303 kabupaten/kota justru mencatat penurunan harga bawang merah.

"Ini menarik untuk diketahui apakah karena konsumsi berkurang, atau justru distribusi sudah lebih merata," ujar Tito.

Selain bawang merah, beras juga menjadi perhatian utama. Berkat operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Bapanas, lonjakan harga beras dapat ditekan di banyak daerah. Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun pada minggu ketiga September 2025, jumlah itu berkurang menjadi 106 daerah. Bahkan, daerah yang mencatat penurunan harga beras semakin meningkat.

Kendati demikian, Tito mengingatkan adanya beberapa komoditas pangan yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi, seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan IPH di minggu ketiga September 2025. Tercatat sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, 22 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 15 provinsi tersebut adalah daging ayam ras dan cabai merah.

Melalui rakor ini, Mendagri kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Bulog, Bank Indonesia, hingga asosiasi pengusaha dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat. (*)

Ketua Dekranasda Kabupaten Butur Beserta Rombongan Dekranasda se-Sultra Berkunjung Ke Anjungan Provinsi Sultra TMII Usai Rakornas



Laporan: Kasrun

JAKARTA- Usai mengikuti Rakornas Posyandu dan Rapat Kerja Nasional Dekranas yang berlangsung pada Tanggal 22 sampai 23 September 2025 di Hotel Mercure Ancol, Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Utara (Butur) Ny. Suhaemi Sudia Afrudin, S.Pd., bersama seluruh Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se-Sultra, memenuhi ajakan dari Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ny. Arinta Nila Hapsari, untuk berkunjung ke anjungan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus berolahraga di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (24/9/2025).

Dalam kesempa-

tan tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Butur Bersama Rombongan Tim Pengurus (TP) Posyandu, Dekranasda dan BKMT Kabupaten Butur, tampak menyesuaikan dengan Rombongan Dekranasda se-Sultra, ikut berolahraga jalan santai menggunakan seragam kaos cream coklat muda, mengelilingi TMII.

Kurang lebih tiga kilometer jarak yang dilalui, Rombongan dipimpin Ketua Dekranasda Provinsi Sultra berjalan kaki, mulai dari Gedung keong mengitari seputaran TMII, finish di Anjungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilanjutkan dengan peninjauan isi anjungan Rumah Adat Sulawesi Tenggara yang didalamnya dipenuhi dengan pakaian baju adat dan kerajinan budaya

lokal dari 17 Kabupaten dan Kota di Sultra.

Olahraga bersama dilakukan, selain untuk menjaga kesehatan fisik, juga dapat membangun silaturahmi, menciptakan semangat dan motivasi, serta kekompakan bagi sesama pengurus Dekranasda, bersama Tim Pengurus Posyandu dan BKMT se-Sulawesi Tenggara.

Di TMII, Ketua Dekranasda Provinsi Sultra Ny. Arinta Nila Hapsari, mengumpulkan seluruh Ketua dan Pengurus untuk melihat langsung isi anjungan yang dipenuhi dengan peragaan pakaian kebesaran Raja dan permaisurinya serta pakaian adat dari berbagai kabupaten di Sultra.

Selain itu, Ia juga menyampaikan arahan dan masukan terkait produk kera-

jinan yang perlu diperbaharui jika ada kekurangan ataupun tdk sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Untuk diketahui, di anjungan Provinsi Sultra TMII, pengunjung dapat menemukan berbagai produk unggulan dan produk UMKM dari Sulawesi Tenggara, seperti kain tenun, produk anyaman tangan, cokelat bubuk, madu, dan beras organik, sebagai bagian dari promosi pariwisata dan budaya daerah.

Diakhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama dengan Ketua Dekranasda Provinsi Sultra, dilanjutkan dengan makan siang sekaligus berdiskusi membahas program kerja hasil rapat kerja Nasional Tanggal 23 September 2025 lalu. (*)

Azhari Apresiasi Kepedulian Bank Sultra dalam Pembangunan Keagamaan



Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Bank Sultra yang telah menunjukkan kepeduliannya melalui dukungan nyata bagi pembangunan keagamaan di daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri dan memberikan sambutan pada penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sultra untuk beberapa Masjid dan Gereja yang berlangsung di Aula Pancana Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Senin (15/9/2025).

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada Bank Sultra. Sampai salam saya kepada Direktur atas perhatian dan kontribusinya bagi masyarakat Buton Tengah,” ujar Bupati Azhari.

Ia menekankan agar bantuan yang diberikan segera

ditindaklanjuti oleh para penerima sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurutnya, meski dukungan pemerintah daerah memiliki keterbatasan, Pemkab Buton Tengah akan terus berupaya mendukung pembangunan, termasuk dalam penyediaan sarana ibadah.

“Kami mohon doa agar pemerintahan ini dapat berjalan lancar, tanpa kepentingan pribadi, dan benar-benar berorientasi pada kemajuan daerah. Semoga apa yang kita perjuangkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Bank Sultra dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pembangunan di daerah, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Melalui bantuan CSR ini, Bank Sultra berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta memperkuat hubungan baik antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Adapun daftar penerima bantuan CSR Bank Sultra tahun 2025, yakni:

1. Masjid Babut Taqwa, Desa Katukobari
 2. Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Stasi Lolibu, Desa Lolibu
 3. Gereja Katolik Santo Lazarus, Desa Dahiango
 4. Masjid Nurul Hayat, Desa Morikana
 5. Gereja Santa Maria Ratu Damai Lakapera, Desa Lakapera
 6. Masjid Attaqwa, Desa Matawine
 7. Masjid Jami Darun Najah, Kelurahan Lakudo
- Hadir dalam kegiatan ini Plt. Sekretaris Daerah Buton Tengah, Muh. Rijal, perwakilan Bank Sultra melalui Kepala KCP Mawasangka, jajaran kepala OPD lingkup Pemkab Buton Tengah, serta para. (*)



Bupati Buton Tengah Buka Rapat Pembahasan Inventarisasi dan Verifikasi Penataan Kawasan Hutan

Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. Azhari, secara resmi membuka rapat pembahasan usulan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi penyelesaian tanah dalam rangka penataan Kawasan

Hutan di Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pancana Kantor Bupati Buteng, Kamis (18/9/2025).

Rapat ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Bupati Azhari menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam penataan kawasan hutan

yang lebih terarah, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Penataan kawasan hutan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya inventarisasi dan verifikasi ini, kita ha-

rapkan tidak ada lagi tumpang tindih maupun sengketa yang merugikan warga,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sultra, perwakilan

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, Asisten I Sekda Buteng, Dinas PUTR Buteng, sejumlah camat se-Kabupaten Buton Tengah, serta

beberapa lurah dan kepala desa.

Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat menyusun langkah-langkah teknis dan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung penataan kawasan hutan secara berkelanjutan di Buton Tengah. (*)

Gubernur Sultra Tinjau Kesiapan Lahan Sekolah Unggul Garuda



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengunjungi lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Desa Lebo Jaya, Konawe Selatan (Konsel), pada Selasa (23 September 2025).

Kedatangan Gubernur disambut oleh

Wakil Bupati Konsel Wahyu Ade Pratama Imran serta perangkat daerah terkait. Dalam kunjungannya, Gubernur Andi Sumangerukka meninjau sejumlah titik lokasi di dalam kawasan pembangunan. Gubernur juga membahas fasilitas yang akan dibangun sebagai penunjang Sekolah Unggul Garuda.

Diharapkan Hadirnya Sekolah Unggul Garuda di Sultra selain dapat menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing secara global, juga dapat menjadi magnet ekonomi.

“Berkaca dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu memiliki sekolah berkualitas taraf nasional, mereka mampu menjadi daerah yang

berkembang. Saya yakin, dengan adanya Sekolah Unggul Garuda di Sultra, daerah ini juga akan semakin berkembang”, tutur Gubernur.

Sekitar 20 hektar tanah dialokasikan untuk pembangunan sekolah yang akan mulai dibangun tahun ini dengan luas bangunan sekitar 4 hektar. (*)

Kasus Cacingan Berat di Seluma Jadi Evaluasi, Kemenkes Lakukan Investigasi dan Tindak Lanjut

Laporan: Rahim

BENGKULU, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan kasus cacingan berat yang dialami seorang Balita di Kabupaten Seluma, Bengkulu, menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektor. Kemenkes langsung melakukan investigasi lapangan dan menyiapkan tindak lanjut untuk memperkuat pencegahan serta penanganan kasus serupa.

“Kasus ini memberikan pelajaran berharga. Investigasi bersama sudah dilakukan, dan tindak lanjut akan difokuskan pada efektivitas program, perbaikan lingkungan, serta pemantauan kesehatan anak,” ujar Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji



Muhawarman, di Jakarta, Kamis (18/9).

Balita berusia 1 tahun 8 bulan berinisial KNS dari Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, dirawat intensif dengan kondisi berat sejak 14 September 2025. Pasien menunjukkan gejala demam, sesak, hingga keuangannya cacing dari hidung dan feses.

Dokter mendiagnosis pasien mengalami bronkopneumonia (sindrom Loeffler), ascariasis, gizi buruk, serta anemia defisiensi besi. Hasil penyelidikan awal mengungkap faktor risiko lingkungan dan gizi sebagai penyebab utama.

Lingkungan rumah pasien tidak layak huni,

lantai masih tanah, tidak ada jendela, lembab, dan jarak sumber air bersih dengan septic tank kurang dari tiga meter. Selain itu, pada Juli 2025, obat cacing telah di berikan kepada orang tua pasien saat Posyandu, tapi tidak bisa dipastikan apakah obat benar sudah diminum.

Investigasi gabungan

Cari Kasus TBC Lebih Cepat, Pemerintah Siapkan Rontgen Gratis ke Daerah



BOYOLALI-Pemerintah terus mengencangkan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan penemuan kasus aktif (active case finding). Langkah ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan, kasus TBC di Indonesia masih cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan serius.

“TBC menjadi masalah penting, karena di Indonesia jumlah kasusnya diperkirakan mencapai 1.060.000 orang. Saat ini baru sekitar 90 persen yang berhasil teridentifikasi dan ternetifikasi,” ujar Prof. Dante saat meninjau kegiatan active case finding TBC di Puskesmas Teras, Kabupaten Boyolali, Jumat (19/9).

Menurutnya, capaian notifikasi tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dibanding-

kan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2022 notifikasi kasus baru 56 persen, sekarang sudah naik berkat program percepatan melalui pemeriksaan rutin dan active case finding yang mampu menemukan kasus aktif yang sebelumnya tidak terdeteksi,” jelasnya.

Prof. Dante menambahkan, banyak kasus TBC tidak terdiagnosis karena gejalanya mirip penyakit ringan.

“Ada pasien yang semakin kurus atau nafsu makan menurun, sering disangka sakit maag biasa, padahal TBC,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah pemeriksaan TBC menggunakan rontgen secara massal. Pemerintah daerah Jawa Tengah sudah memulainya dengan pemeriksaan rontgen, dan ini terbukti efektif.

Ke depan, pemerintah pusat merencanakan penyediaan alat rontgen untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Kalau anggaran mencukupi, setiap dari 514 kabupaten/kota akan

mendapatkan alat rontgen. Alat ini akan digunakan secara bergilir ke kecamatan-kecamatan dan diberikan gratis untuk masyarakat dalam rangka pemeriksaan kesehatan maupun active case finding TBC,” katanya.

Selain rontgen, deteksi dini TBC juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan formulir skrining. Dengan kombinasi metode ini, Prof. Dante optimistis angka kasus TBC dapat ditekan secara signifikan.

“Angka kematian akibat TBC masih tinggi. Data tahun 2022 menunjukkan 386 kasus per 100 ribu penduduk. Target kita menurunkan menjadi 65 per 100 ribu penduduk pada tahun 2030,” tegasnya.

Program percepatan penanggulangan TBC merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk aktif mendukung program ini melalui alokasi anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, dan sosialisasi yang masif di masyarakat. (*)

pada 17 September 2025 melibatkan Kemenkes, Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma, hingga Baznas. Tim juga menemukan kakak pasien yang berusia 4 tahun mengalami kasus serupa dan kini dirawat di RS Ummi dengan diagnosis ascariasis dan gizi kurang.

“Padahal cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)

Cacingan di Seluma tercatat 99 persen. Karena itu, evaluasi akan diarahkan pada pemantauan kepatuhan minum obat di masyarakat,” tambah Aji.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes memastikan POPM cacingan di desa setempat tetap digencarkan dengan memastikan obat diminum langsung di depan petugas. Selain itu, penyuluhan berkala, kunjungan rumah, dan

pemantauan balita yang tidak hadir di Posyandu akan diperkuat.

Pemerintah daerah bersama Baznas juga akan melaksanakan program bedah rumah untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga. Kemenko PMK memastikan koordinasi lintas sektor terus berjalan agar perbaikan kesehatan dan lingkungan berlangsung berkelanjutan. (*)

Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi, Firman, Amat Jr

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Total 959 Tersangka Demo Agustus se-Indonesia, Termasuk 295 Anak-anak



Pewartu: Alwan

JAKARTA-Mabes Polri mencatat 959 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardianto mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan oleh 15 Polda berdasarkan 264 laporan polisi (LP).

"Polri menetapkan 959 orang tersangka," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (24/9).

Syahr menjelaskan dari jumlah tersangka itu sebanyak 664 orang dewasa dan 295 di antaranya berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

"Kita bedakan antara tersangka dewasa dengan anak. Karena penanganannya berbeda," jelasnya.

Syahr mengatakan dari total ratusan anak itu sebanyak 214 diantaranya telah dipulangkan kepada orang tua dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kemudian 68 orang anak telah dilakukan diversifikasi atau penyelesaian secara restorative justice.

Ia menjelaskan para tersangka dijerat dengan berbagai pasal mulai dari perusakan, penghasutan, penganiayaan, pencurian, dan pasal lainnya.

Dalam kasus ini, Syahr menyebut penyidik menyita barang bukti mulai

dari bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster, poster hingga kendaraan yang dipakai pelaku.

Berikut rincian daftar tersangka masing-masing Polda dan Bareskrim:

- 1.Polda Jambi (3 Tersangka Dewasa) (Nihil Anak)
- 2.Polda Lampung (1 Tersangka Dewasa) (7 Anak)
- 3.Polda Sumsel (12 Tersangka Dewasa) (3 Anak dan ditahan)
- 4.Polda Banten (2 Tersangka Dewasa) (Nihil Anak)
- 5.Polda Metro Jaya (200 Tersangka Dewasa) (32 Anak, 16 ditahan)
- 6.Polda Jabar (80 Tersangka Dewasa) (31 Anak)
- 7.Polda Jateng (80

Tersangka Dewasa) (56 Anak, 10 ditahan)

8.Polda Jatim (185 Tersangka Dewasa) (140 Anak, 43 ditahan)

9.Polda DIY (4 Tersangka Dewasa) (1 Anak)

10.Polda Bali (10 Tersangka Dewasa) (4 Anak)

11.Polda NTB (15 Tersangka Dewasa) (6 Anak)

12.Polda Kalbar (1 Tersangka Dewasa) (3 Anak dan ditahan)

13.Polda Kaltim (7 Tersangka Dewasa) (Nihil Anak)

14.Polda Sulbar (2 Tersangka Dewasa) (Nihil Anak)

15. Polda Sulsel (46 Tersangka Dewasa) (12 Anak, 6 ditahan)

16.Bareskrim Polri (5 Tersangka Dewasa) (Nihil Anak). (*)

Kejagung Periksa Eks Menpan Azwar Anas di Kasus Korupsi Laptop Nadiem

Laporan: Hamid

JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Rabu (23/9) hari ini.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur SMP Kemendikbudristek



Eks Menpan RB Azwar Anas dikenal pula pernah menjadi Kepala LKPP.

2020-2021, Mulyatsyah; Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan;

dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga

Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun. (*)

Pengacara Buka Suara Menas Erwin Ditangkap KPK

Laporan: Hadi

JAKARTA-Pengacara Direktur PT Wahana Adyawarna (WA) Menas Erwin Djohansyah, Elfano Eneilmy buka suara merespons upaya jemput paksa yang dilakukan KPK pada Rabu (24/9) malam.

Elfano mengatakan jemput paksa ataupun penangkapan terhadap kliennya tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan KPK. Tim penasihat hukum menghormati tindakan dimaksud.

"Upaya paksa penjemputan ini secara hukum adalah murni hak dari KPK setelah terpenuhinya syarat tidak datang memenuhi panggilan sebanyak 2 kali," ujar Elfano saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (24/9) malam.

Dia mengatakan tim penasihat hukum belum bisa langsung memberikan pendampingan hukum karena terbentur jarak. "Pendampingan mungkin baru bisa di-

lakukan esok karena tim kuasa hukum sedang berada di luar kota," ucap Elfano.

KPK menangkap Menas Erwin setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali.

Menas Erwin merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dia diduga menyuap mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Hanya saja, konstruksi kasusnya belum diberikan penjelasan detail oleh KPK.

Nama Menas Erwin sebelumnya sempat muncul dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasbi Hasan. Hanya saja, dia di sana disebut sebagai pihak pemberi gratifikasi.

Pada 5 April 2021 sampai dengan 5 Juli 2021, bertempat di Fraser Residence Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor

510 tipe Apartemen-disebut Hasbi dengan istilah 'SIO'- senilai Rp120.100.000 dari Menas Erwin.

Kemudian pada 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021, bertempat di The Hermitage Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa dua unit kamar yaitu kamar nomor 111 tipe junior suite dan kamar nomor 205 tipe executive suite senilai total Rp240.544.400 dari Menas Erwin.

Terakhir, pada 21 November 2021 sampai dengan 22 Februari 2022, bertempat di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 0601 dan kamar nomor 1202 tipe kamar executive suite senilai Rp162.700.000 dari Menas Erwin.

Penerimaan fasilitas tersebut disebut jaksa KPK berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. (*)

Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ditangkap KPK di BSD

Laporan: Alwan

JAKARTA-Tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Direktur PT Wahana Adyawarna (WA) Menas Erwin Djohansyah, ditangkap KPK di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu (24/9) malam, setelah Menas Erwin menghindari panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali.

"Penangkapan dilakukan oleh tim di wilayah BSD," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan video, Rabu (24/9) malam.

"Penangkapan dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan," sambung Budi.

Dikonfirmasi terpisah, Pengacara Menas Erwin yakni Elfano Eneilmy mengatakan pihaknya menghormati upaya paksa yang dilakukan KPK tersebut.

"Upaya paksa penjemputan ini secara hukum adalah murni

hak dari KPK setelah terpenuhinya syarat tidak datang memenuhi panggilan sebanyak 2 kali," ujar Elfano saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (24/9) malam.

Dia mengatakan tim penasihat hukum belum bisa langsung memberikan pendampingan hukum karena terbentur jarak.

"Pendampingan mungkin baru bisa dilakukan esok karena tim kuasa hukum sedang berada di luar kota," ucap Elfano.

Menas Erwin diduga menyuap mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Hanya saja, konstruksi kasusnya belum diberikan penjelasan detail oleh KPK.

Nama Menas Erwin sebelumnya sempat muncul dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasbi Hasan. Hanya saja, dia di sana disebut sebagai pihak pemberi gratifikasi.

Pada 5 April 2021 sampai dengan 5 Juli 2021, bertempat di Fraser Residence Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas pengina-

pan berupa sewa kamar nomor 510 tipe Apartemen- disebut Hasbi dengan istilah 'SIO'- senilai Rp120.100.000 dari Menas Erwin.

Kemudian pada 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021, bertempat di The Hermitage Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa dua unit kamar yaitu kamar nomor 111 tipe junior suite dan kamar nomor 205 tipe executive suite senilai total Rp240.544.400 dari Menas Erwin.

Terakhir, pada 21 November 2021 sampai dengan 22 Februari 2022, bertempat di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 0601 dan kamar nomor 1202 tipe kamar executive suite senilai Rp162.700.000 dari Menas Erwin.

Penerimaan fasilitas tersebut disebut jaksa KPK berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. (*)

H Yusran - Hamsinah Berkeinginan DLH Baubau Jadi Contoh Daerah Lain Dalam Pengelolaan Sampah



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Persoalan sampah yang ada di Kota Baubau menjadi perhatian serius Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. Betapa tidak, meskipun penetapan jam pengangkutan sampah sudah dilakukan, namun masih ada saja masyarakat yang tidak patuh dengan jadwal pengangkutan sampah tersebut. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baubau harus dapat mengatasi persoalan pengelolaan sampah ini dengan baik.

“Saya kira bukan

hanya di Baubau yang mengalami hal seperti ini, tetap semua daerah mengalami hal serupa juga. Akan tetapi saya harapkan ada gagasan-gagasan yang memiliki pengalaman banyak apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi problem kita ini. Jadi kita bisa mencontoh pengalaman dari daerah lain, sehingga sampah kita bisa terkelola dengan baik,” ujar Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE didampingi Wawali Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat audiens bersama dengan DLH Kota Baubau terkait dengan ekspose pengelolaan

persampahan Tahun 2025 di aula kantor DLH Kota Baubau Rabu (24/09/2025).

Ditambahkan, pengelolaan persampahan di Kota Baubau harus diselesaikan dan perlu dilakukan tindakan lanjut termaksud dapat menghadirkan ahli persampahan terkait kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persampahan di Kota Baubau. Atau apakah harus ada lagi referensi dengan belajar dari daerah lain sehingga masalah persampahan bisa terselesaikan. Selain itu juga, apabila mengacu pada anggaran, berapa pun

anggaran yang diberikan untuk membiayai, pihaknya yakin tidak akan cukup karena masih banyak problem yang belum teratasi dengan baik.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini melihat ada potensi terutama terkait dengan pemungut sampah yang mengumpulkan plastik dimana tidak ada upaya dari DLH seperti membuat koperasi sebagaimana yang terlihat di media di suatu daerah itu, dikelola oleh DLH dengan membuat pavin blok dari sampah dan lain sebagainya sehingga hal tersebut bisa mendapatkan PAD dari dinas yang bersangkutan. (*)

Baubau Masuk 37 Kabupaten/ Kota Terbaik Se-Indonesia Dalam Tata Kelola Transformasi Digital GM-DTGI Awards 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERBAIK
DI SETIAP PROVINSI DI INDONESIA
DALAM TATA KELOLA TRANSFORMASI DIGITAL 2025
VERSI GM-DTGI

Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh

Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara

Kota Padang Panjang
Provinsi Sumatera Barat

Kota Pekanbaru
Provinsi Riau

Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Kota Jambi
Provinsi Jambi

Kab. Ogan Komering Ilir

Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Kota Yogyakarta
Provinsi DI. Yogyakarta

Kab. Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur

Kab. Badung
Provinsi Bali

Kab. Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kab. Manggarai
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kota Singkawang

Kota Tomohon
Provinsi Sulawesi Utara

Kab. Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah

Kab. Majene
Provinsi Sulawesi Barat

Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Baubau
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kota Ambon
Provinsi Maluku

Kota Ternate

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau masuk dalam 37 Kabupaten/Kota terbaik dari 98 Kota se Indonesia dan terbaik pertama untuk Provinsi Sulawesi Tenggara kategori tata kelola transformasi digital pada Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2025.

Kepala Diskominfo Kota Baubau H Andi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si dalam siaran persnya Selasa (23/09/2025) mengungkapkan, masuknya Kota Baubau dalam 37 Kabupaten/Kota terbaik se Indonesia dalam tata kelola transformasi digital pada GM-DTGI 2025 menjadi penyemangat dan dorongan bagi Pemkot Baubau untuk menjadi lebih baik lagi. “Kita harus bekerja lagi untuk maksimal. Bagaimana supaya peran pemerintah dapat

secara maksimal dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Andi Hamzah Machmud berharap pada tahun berikutnya, Pemkot Baubau dapat meningkatkan tata kelola transformasi digital menjadi lebih baik lagi.

Dijelaskan, GM-DTGI merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia. GM-DTGI dikembangkan oleh PKS FEB UGM bekerjasama dengan Kementerian Komdigi, yang akan menilai tujuh pilar utama yakni tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, dan keamanan siber dan ketahanan siber. (An)

Realisasi Keuangan, Baubau di Posisi Kedua Jadwal Penginputan Tepat Waktu



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Berdasarkan rekapitulasi keuangan yang telah dilaporkan realisasi fisik dan diinput melalui aplikasi e-pengendalian fitur tepra biro administrasi pembangunan sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 3 kabupaten/kota dengan jadwal penginputan yang te-

pat waktu selama 3 bulan terakhir yakni Kota Kendari realisasi keuangan 46,33%, Kota Baubau realisasi keuangan 43,77% dan Kab Buton Tengah realisasi keuangan 39,64%.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sultra melalui staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik H La Ode Fasikin, S.Pi., M. Si saat mem-

buka kegiatan dalam rangka Pembinaan Dan Sosialisasi Pembangunan Daerah Tahun 2025 di Tamimu Ball Room Nirwana Buton Villa Baubau Selasa (23/09/2025).

Menurutnya, memperhatikan capaian tersebut tentunya masih sangat kecil, namun demikian ketiga Kabupaten/Kota tersebut mempunyai komitmen untuk

melaksanakan pelaporan tepat waktu sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 900.1.6.4/2737 tanggal 24 juni 2024 perihal percepatan penyusunan laporan bulanan. Dan diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sultra agar semua pencapaian realisasi baik

fisik maupun keuangan dan penginputan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik melalui biro administrasi pembangunan dengan tepat waktu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur sehingga dapat memastikan semua progres serapan anggaran dan progres fisik berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, dapatlah diketahui kinerja dari setiap kabupaten/kota. Oleh sebab itu, jika serapan anggaran dan progres fisik rendah, maka dapat dipastikan kinerja dari Kabupaten/Kota tersebut belum optimal, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius kepala daerah yang

bersangkutan, untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan kinerja jajarannya sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Dijelaskan, rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan sosialisasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diselenggarakan dengan tujuan penyampaian informasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kabupaten/Kota serta meningkatkan koordinasi serta sinergitas antar stakeholder dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan melalui evaluasi laporan penyusunan APBD Kabupaten/

Kota. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga menjadi tempat pertukaran ide dan pengalaman, dan menjadi instrumen efektif dalam memastikan bahwa setiap daerah memiliki pemahaman yang holistik mengenai program unggulan bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Dengan pendekatan yang dinamis dan beragam ini, diharapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Mewujudkan Sulawesi Tenggara Maju yang aman, sejahtera dan religius yang adil dan merata di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya. (*)